

## DINAMIKA DAN TANTANGAN JELANG PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019

**Adelia Fitri**

Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan  
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
[adeliafitri93@gmail.com](mailto:adeliafitri93@gmail.com)

### ABSTRAK

Demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia. Esensi demokrasi adalah mekanisme kompetitif dalam memilih pemimpin melalui kontestasi mendapatkan suara rakyat sehingga pemimpin yang terpilih tersebut bisa membuat keputusan-keputusan politik disebuah negara. Kontestasi ini tidak hanya merujuk kepada tingkat local, namun hingga tingkat nasional. Berbagai aspek turut menjadi tantangan menjelang pemilu 2019. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tantangan menjelang pemilihan umum tahun 2019. Dalam tulisan ini menggunakan metode tinjauan literature ( *library research* ). Pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa tantangan pemilihan umum 2019 adalah : bagaimana menghadapi tantangan menjelang pemilihan umum 2019 di Indonesia untuk melaksanakan kontestasi politik yang efektif guna membangun kemapanan politik.

**Kata kunci: Pemilu 2019, Demokrasi**

### PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu didalam lembaga-lembaga politik formal yakni, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat (Darmawan,2015:144). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemimpin yang akan akan menduduki jabatan politik ialah orang-orang yang mempunyai kekuasaan terhadap arah kebijakan dimasa mendatang terhadap negeri didaerah maupun dipusat yang mempunyai pengaruh jabatan politik yang dimana dipilih melalui alat atau mekanisme rakyat untuk memilih pemimpin.

Ada beberapa fungsi pemilihan umum yaitu pertama sebagai alat atau

mekanisme rakyat untuk memilih pemimpin. Pemilihan umum di negara yang mengedepankan sistem demokratis mengutamakan kehendak rakyat sebagai suara tertinggi disistem pemerintahan dan politik, dengan mengedepankan kehendak rakyat maka pemilu sebagai alat untuk menyaring kehendak rakyat dalam mempresentasikan pemimpin keinginan rakyat. Yang kedua pemilu juga dapat dikatakan sebagai membentuk agenda kebijakan kedepan, dimana hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pembentuk kebijakan public berdasarkan arah rezim yang berkuasa serta pendistribusian kekuasaan dan sumber daya di pemerintahan. Yang ketiga fungsi pemilihan umum yang tidak lepas dari sistem memilih wakil-wakil. Yang keempat menentukan komposisi diparlemen serta yang kelima yaitu mempengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya di pemerintahan. Negara yang demokrasi apabila sumber daya dan kekuasaan akan menyebar/ terdistribusi dengan baik kepada rakyat diseluruh penjuru negeri. Distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak menyebar bahkan terpusat akan mengakibatkan sistem *autocracy* pada suatu negara tentu saja sistem autocracy ini sangat berbeda dengan demokrasi yang menginginkan rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi di sistem perpolitikan.

Sistem politik yang demokratis didasarkan kepada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat diasumsikan paling sedikit sama kuat, atau lebih kuat dari pada pemerintahan. Bila pemerintahan lebih kuat dari rakyat biasanya terjadi sistem yang otoriter. Kalau pemerintah yang lebih kuat ini menyelenggarakan sistem politik yang demokratis, demokrasi ini hanya merupakan demokrasi pinjaman. Bila mana pemerintah kurang berkenan dengan demokrasi yang diberikan, dia dengan mudah dapat menariknya kembali. ( Budiman,1996:39)

Karena itu, sistem demokrasi yang kuat berasal dari mapannya politik yang berimbang di pemerintah maupun masyarakat. Menurut Tatu Vanhanen (2018:12) demokrasi merupakan *top-down process*. Demokrasi adalah *political engineering*, yakni bagaimana membangun istitusi-institusi politik yang

membuat distribusi kekuasaan (*power sharing*) memberikan kesempatan yang sama (demokratis) bagi setiap aktor atau kelompok yang berkompetesi. Jika disandingkan dengan menurut Sen (Mas'udi,2018:9) demokrasi politik tidak memerlukan prasyarat pembangunan ekonomi tertentu mengingat proses demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang akuntabel yang nantinya dapat bertanggungjawab untuk membangun kemakmuran sosial. Pelaksanaan pemilihan umum terkait pilpres 2019 di Indonesia hendaknya mengaktifitas kegiatan pemilu dalam kerangka tersebut demokrasi pusat ke daerah yang mampu menghasilkan pemimpin serta mampu menghidupkan asas *governability*. Menurut Azka *Governability* merupakan keseimbangan pemerintahan dan kemampuan memerintah, *governability* dipengaruhi oleh sejumlah partai, tingkat polarisasi antar partai, partisipasi partai dalam pemerintahan, serta hubungan antara mayoritas legislatif dan eksekutif (Edward, 2018:115).

Di Indonesia terkait dengan dilaksanakan pilpres 2019 dimasa mendatang harus adanya kematangan dalam demokrasi dalam penelitian Savirani dan Tornquist (2015) "Power, Welfare, And Democracy" (PWD) pada tahun 2015 (Mas'udi, 2018) menyimpulkan tiga temuan pokok dalam isu kesejahteraan. Pertama, demokratisasi Indonesia telah memasuki babak baru yang melampaui demokrasi formal yang sebatas penyelenggaraan pemilu. Hal ini terkait pilpres 2019 mendatang yaitu biasanya para kandidat akan mengangkat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan isu kesejahteraan dalam kampanyenya. Kedua, warga negara biasanya menggantungkan masalah pemenuhan kesejahteraan pada negara, sementara di sisi lain negara mempunyai keterbatasan untuk memenuhi segala tuntutan. Ketiga, bagaimana warga memanfaatkan berbagai saluran untuk menyampaikan pemenuhan pelayanan dasar mereka termasuk saluran-saluran informal seperti tokoh, lembaga komunal termasuk pasar sebagai alternatif kelas

menengah (Mas'udi W dan cornelis lay, 2018).

Pilpres 2019 dimasa mendatang tentu tidak lepas dari adanya isu kesejahteraan dimana masyarakat sangat berharap pada negara untuk memenuhi segala tuntutan meskipun negara mempunyai keterbatasan terhadap akses dan tuntutan serta masyarakat memanfaatkan pemenuhan pelayanan dasar seperti saluran informal. Sebagai alternatif untuk memenuhi segala tuntutan yang berada pada pelayanan dasar. Pilpres 2019 di masa mendatang menjadikan ajang para aktor-aktor politik untuk bertarung memenangkan hati masyarakat melalui isu kesejahteraan. Tak jarang para aktor politik menurut kajian tentang politik patronase dalam pemilu Indonesia tahun 2014 (Aspinall dan Sukmajati, 2015) menyatakan bahwa berbagai skema kesejahteraan sering dikembangkan terutama bertujuan untuk memperoleh dukungan elektoral dan dikelola dengan memelihara ikatan klientelisme.

Target utama dari aktor-aktor politik dalam pilpres yaitu kelompok yang berpendapatan rendah dan rakyat miskin. Sejumlah kajian yang menyatakan bahwa kesejahteraan, dalam bentuk kemakmuran ekonomi adalah prasyarat untuk perkembangan demokrasi. Kaitan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi telah mendorong banyak negarawan barat dan komentator politik untuk memutuskan bahwa problem politik mendasarkan kepada tekanan dari industrialisasi yang cepat. (Lipset, 2007:35). Kemakmuran ekonomi mendorong peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan, menumbuhkan kelas sadar politik, penegakan hukum yang baik dan kompetisi ekonomi yang jujur. Dalam momentum pilpres 2019 mendatang hal mendasar yang mesti dipenuhi masyarakat dalam memilih pemimpin dengan rasionalitas yaitu melalui pendidikan politik yang baik di suatu negara.

Sedangkan kajian lain menyatakan bahwa demokrasi ialah syarat yang mesti

dipenuhi oleh negara-negara yang memiliki esensi demokrasi mekanisme memilih pemimpin melalui kontestasi mendapatkan suara rakyat sehingga pemimpin yang terpilih tersebut bisa membuat keputusan-keputusan politik sebuah negara. (Schumpeter, 2003:411). Terkait dengan isu pilpres 2019 dimasa mendatang yaitu negara menyelenggarakan suatu kesempatan dimana masyarakat dengan bebas dan merdeka untuk menerima segala visi misi yang digaungkan oleh para kandidat dan program-program yang dicanangkan para aktor-aktor politik ataupun menolak program-program maupun visi misi aktor yang tidak sesuai dengan keinginan dan kondisi rakyat dengan tidak memilih pasangan di hari pencoblosan.

Sementara di Indonesia merupakan negara yang memilih sistem demokrasi hal ini tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi yang dipilih tentu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sistem ini berkaitan dengan hak politik yang ada di setiap warga negara Indonesia. Identitas sebagai warga negara tentu memiliki hak untuk mengontrol langsung pada pemerintahan, sebelum berada di jabatan politis yang mempengaruhi arah kebijakan pemerintahan tentunya melalui mekanisme pemilu.

Indonesia akan menjajaki babak baru dalam praktek demokrasi yakni dengan selenggara pemilihan presiden serta wakil presiden, pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota pada tahun 2019 mendatang. Kegiatan pemilu pilpres pada tahun 2019 mendatang di Indonesia menggunakan sistem plurality sistem. Sistem plurality yang dikenal sebagai *first-past-the-post* (FPTP). FPTP adalah sistem pemilu yang sederhana karena seseorang kandidat perlu memiliki suara yang lebih banyak dari pada penantangannya yang lain. Cara memilih presiden dan wakil presiden dengan sistem suara terbanyak atau suara mayoritas.

Pemilihan umum pada tahun 2019 tentunya menggunakan rambu-rambu UU yang mendasari terlaksananya pemilu dengan asas secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil ( LUBERJURDIL). Landasan undang-undang pemilu di Indonesia yaitu berdasarkan uu no. 7 tahun 2017. Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa kampanye serta pemungutan suara dilakukan secara serentak. Pada pilpres 2019 ini untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak sehat dalam hal kampanye maupun saat pemilihan terlaksana.

Dengan terlaksananya pilpres di tahun 2019 mendatang memungkinkan terjadinya tantangan-tantangan yang terkait dengan isu saat kampanye maupun isu-isu tantangan yang terjadi saat pemilihan umum terlaksana. Dalam tulisan ini penulis akan mengutarakan beberapa isu terkait dengan kampanye pilpres di tahun 2019.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data penelitian kepustakaan atau *library research*. Penulis memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan penelusuran dan pencarian dokumen dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga menjadi bahan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengelompokkan data yang bersifat kualitatif. Metode ini menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan, memahami alur peristiwa secara kronologis, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai teori yang ada. Obyek yang diteliti yaitu tantangan menjelang pemilihan umum tahun 2019.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan umum adalah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu didalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah (Darmawan,2015:144). Pemilihan umum adalah sebuah sarana untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam sebuah negara. Inti dari pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk sebuah lembaga perwakilan atau pemerintahan yang memiliki tugas menyelenggarakan sebuah negara. (Edward,2018:115).

Menurut ikhsan (darmawan,2018:145) Jenis pemilihan umum didunia antara lain :

- *plurality system*. Plurality sistem atau dikenal dengan first-past-the-post, adalah sistem pemilu yang sederhana karena seseorang kandidat perlu memiliki suara yang lebih banyak daripada penantang yang lain.
- *Majority system*. Sistem majority adalah sistem yang lebih kompleks daripada sistem plurality
- *Proportional*. Sistem proporsional biasa digunakan hanya pada wilayah yang bertingkat dan banyak, sehingga tidak mungkin mendistribusikan satu kursi diantara banyak partai politik, kecuali pada basis kronologis
- *District*. Jenis district melihat pilihan pertama yang berkaitan dengan district magnitude
- *Electoral formula*. Jenis electoral formula melihat pilihan kedua melibatkan metode dimana kursi didistribusikan dalam tiap distrik.
- *Tiers*. Kebanyakan negara dengan sistem proporsional menempatkan sebuah pengikat (tier) distrik (baik nasional maupun lokal).
- *Thresholds*. Jenis threshold umum digunakan dengan menggunakan persentase yang tetap dari suara nasional atau distrik

- *Preference*. pilihan ini ada di negara dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup, dimana pemilih tidak diizinkan untuk mengekspresikan pilihan untuk calon individu dan anggota dipilih dengan patokan daftar partai politik
- *Mixedsystem*. Secara teknis memang tidak mudah namun sangatlah mungkin untuk menggabungkan sistem pemilu berbeda secara bersama-sama dengan tujuan menggabungkan sistem.

## **PEMBAHASAN**

Dengan terlaksananya pilpres di tahun 2019 mendatang memungkinkan terjadinya tantangan-tantangan yang terkait dengan isu saat kampanye maupun isu-isu tantangan yang terjadi saat pemilihan umum terlaksana. Dalam tulisan ini akan mengutarakan beberapa isu terkait dengan kampanye pilpres di tahun 2019.

### **Isu Kampanye Pilpres 2019**

Pemilihan umum yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak dalam pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tentu diwarnai dengan tantangan-tantangan yang akan terjadi dimasa kampanye sampai hari pemilihan. Pemilu sebagai arena kompetisi tentu tidak luput dari kecurangan maupun ketidaksehatan cara dalam meraih suara rakyat. Dalam kampanye pilpres pada tahun 2019 yang mengusung nomor urut 1 yaitu bapak Joko widodo dan prof. KH. Makruf amin serta di posisi nomor urut ke 2 yaitu bapak Prabowo subianto dan Sandiaga uno.

Pemilihan umum eksekutif dan legislatif mendatang mesti adanya pengontrolan di masyarakat. Pemilu sebagai arena kompetisi untuk



memperebutkan kursi kekuasaan tidak luput dari berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran. Istilah dagang suara (*vote trading*) dan pembelian suara (*vote buying*). *Vote buying* bermakna memberikan sesuatu (uang, barang, dan lain-lain) kepada pemilih. Praktek *vote trading* dan *vote buying* tentunya menjadi tantangan dari sejumlah tantangan yang bisa terjadi pada pemilu di tahun 2019 mendatang jika para masyarakat tidak mengawasi yang dapat mencederai demokrasi.

Praktik lain yang bisa terjadi menurut kajian politik patronase dalam pemilu Indonesia 2014 (Aspinall Dan Sukmajati, 2015) menyatakan bahwa berbagai skema kesejahteraan seringkali dikembangkan terutama bertujuan untuk memperoleh dukungan electoral dan dikelola dengan memelihara ikatan klientisme. Patronase didefinisikan sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Barang-barang kelompok (*Club goods*) sebagai praktek patronase yang diberikan keuntungan kelompok sosial ketimbang keuntungan individual. Adanya *pork barrel* yaitu kegiatan yang ditujukan kepada public dan didanai dengan dana publik dengan harapan public akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Pilpres 2019 tidak lepas dari dukungan partai politik sebagai alat pendemokrasian di Indonesia. Menurut Miriam Budiarmo (darmawan, 2015:144) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil dan materil. Yang dimaksud dengan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan ialah sekelompok orang yang memiliki tujuan sama, idiologi sama untuk menjadikan partai sebagai alat mencapai tujuannya yakni kekuasaan.

Partai pengusung pilpres yakni PDI-P dan Gerindra, ditahun lalu mengusung calon pilpres yang sama pada tahun 2019 dengan partai yang sama. Kedua partai ini mendapatkan koalisi pendukung untuk lolos di putaran pemilihan calon presiden dan wakil presiden di masa 2019 mendatang. Peneliti berpendapat bahwa partai pengusung dan partai koalisi yang bertarung mesti meletakkan aktor sebagai hal utama untuk meraih suara terbanyak memenangi pertarungan pilpres 2019 dimasa mendatang. PDIP mengusung bapak Jokowi sebagai calon presiden dan Gerindra mengusung ketua partai yakni bapak Prabowo sebagai calon presiden. Popularitas aktor selain menunjang suara dari masyarakat juga berpengaruh terhadap pamor-nya suatu partai. Pada tahun 2014 pilpres, PDI-P nomor urut 2 mendapatkan total suara 53 % sementara partai Gerindra nomor urut 2 mendapatkan 47% dari total suara.

Dari keterangan peneliti menyimpulkan bahwa popularitas aktor sangat dominan dalam meraih suara di kemenangan pilpres. Partai hanya dipandang sebagai alat untuk mengkollektivitas kepentingan bersama meraih kekuasaan dan sumber daya. Pada tahun 2014 bapak Jokowi menang telak dari bapak Prabowo, hal ini karena kesuksesan bapak Jokowi meraih simpati masyarakat melalui kampanyenya “kerja...kerja..kerja, kerja nyata, blusukan, rakyat, berjiwa muda dan sebagainya, sementara bapak Prabowo mencirikan dirinya yang tegas seperti sosok Soekarno.

Kajian tentang kesejahteraan menurut Mas’udi (Mas’udi, 2018:3) ialah bahwa ramuan-ramuan kebijakan populis seperti bantuan tunai langsung, subsidi langsung masyarakat miskin, dan subsidi layanan dasar terutama dikembangkan sebagai instrumen populis untuk menciptakan legitimasi kepemimpinan politik. Menurut Savirani Terkait pilpres 2019 dimasa mendatang tentunya bantuan kesejahteraan dilakukan dengan cara-cara klientistik dan populis daripada cara-cara demokratis ( Mas’udi, 2018:3).

Menurut Edward Aspinal Dan Mada Sukmajati patronase adalah sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Edward aspinal, 2015:3). Disini patronase merujuk kepada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilihnya untuk memilihnya dalam konteks pilpres 2019, biasanya sumber material ditukarkan untuk mendapatkan suara dari pemilihnya yang juga menjadi ajang kesempatan kelompok kepentingan tertentu.

Aktor-aktor politik yang bertarung dalam pilpres 2019 tentu akan menggunakan isu-isu pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi yang menuju kebijakan kepada kaum miskin dan perekonomian pendapatan yang rendah. Disisi lain para aktor menyadari keterbatasan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan, hingga isu-isu yang dimainkan aktor untuk melawan politiknya petahana dalam hal ini menyinggung permasalahan pelayanan dasar, kemiskinan, perekonomian serta adanya isu-isu kegagalan pemerintah yang dijadikan isu menarik suara dan simpati masyarakat.

### **Isu *Black Campaign* Pilpres 2019**

Pada pilpres 2019 dimasa mendatang sangat rentan dengan pertarungan yang menghalalkan segala cara untuk meraih simpatisan masyarakat termasuk *black campaign*. Dalam hal ini *black campaign* termasuk *hoax*, *money politics*, *vote buying*, dan sebagainya yang melanggar norma-norma sosial dan kode etik. Dalam hal ini saya ingin mengutarakan fenomena *hoax* yang terjadi di Indonesia. Kasus Ratna Saruempet yang merupakan sebagai ketua tim sukses dari capres nomor urut 2 yakni Prabowo dan Sandi terkait kasus *hoax* yang dimana Ratna awalnya mengaku di keroyok oleh sejumlah orang di Bandung.

Mendengar pernyataan dan kondisi Ratna pada saat itu para politisi yang berkoalisi di partai Gerindra dan para pemuka politisi pendukung kubu nomor urut 2 yakni Prabowo Sandi segera mengeluarkan pernyataan penudingan terhadap kubu nomor urut 1 yakni Jokowi dan KH Ma'ruf Amin telah melakukan penganiayaan. Diketahui bahwa Ratna tidak di anisaya namun kondisi Ratna begitu karena melakukan operasi plastik. Ratna mengakui kesalahannya melalui media dengan jumpa pers.

Menurut peneliti dari kasus hoax yang dilakukan Ratna Sarumpaet yang menyeret para tokoh politisi telah mencerminkan adanya *black campaign* yang dituduhkan terlalu cepat untuk menjatuhkan lawan politik meskipun belum ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk menuding namun dengan adanya kejadian Ratna terlalu cepat juga melakukan konferensi pers yang dilakukan Prabowo untuk mengutuk pelaku penganiayaan terhadap Ratna dinilai kontennya menarik untuk menjatuhkan lawan politik itu hal ini termasuk dari *blackcampaign*.

Selanjutnya *blackcampaign* yang sering terjadi yaitu politik uang. Politik uang sering terjadi di Indonesia menjelang pemilu. Politik uang dijadikan pintu gerbang para pemilik modal untuk mendapatkan akses terhadap jabatan politik. Para pemilik modal melakukan perkawinan terhadap politik untuk menyelamatkan usaha mereka, untuk mengontrol kebijakan agar tidak merugikan mereka. Politisi yang terjun juga ada istilah mahar politik. Mahar politik ini dijadikan sebagai modal awal untuk meraih jabatan tertentu yang strategis dengan menyumbangkan uang kepada partai politik dan koalisi partai untuk memenuhi syarat mendapatkan jabatan tertentu. Momentum pilpres 2019 sarat dengan perkawinan politik dan bisnis yang bisa dilihat dari representasi capres dan cawapres melalui drama politik bahkan melibatkan tokoh-tokoh agama dalam penentuan cawapres untuk mendampingi Prabowo.

Menurut peneliti pada pilpres 2019 ini sangat rentan dengan uang yang menjadi modal awal untuk mendapatkan jabatan politik. Hal ini dapat dilihat dari itjima ulama dengan jilid kesekian kali dan mengusung calon dari tokoh agama. Namun disisi lain itjima ulama tidak diindahkan oleh Prabowo dengan memilih Sandiaga uno. Sedangkan Joko widodo yang tidak berdasarkan kepada itjima ulama, memilih KH. Makruf amin sebagai cawapres yang sebelumnya digadangkan nama Prof. Mahfud MD.

### **Penting Pendidikan Politik Menjelang Pilpres 2019**

Di tahun-tahun politik yang sangat rentan dengan pelanggaran serta adanya manipulasi maka rakyat yang memilih harus cerdas sebagai pemilih yang memiliki kapabilitas untuk memilih. Untuk mendapatkan kapabilitas/kemampuan memilih sudah sebaiknya rakyat mendapatkan pendidikan politik.

Pendidikan politik yang didapatkan masyarakat mesti dilakukan secara keberlanjutan. Kerawanan pemilu yang berpotensi pada konflik di pilpres 2019 perlunya partisipasi masyarakat yang cerdas. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai penyumbangan hak suara saja namun diambang pengontrolan pemerintah mesti dilakukan. Pemilihan pemimpin yang baik harus dilaksanakan dengan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang cerdas dilahirkan melalui pendidikan politik yang mencerdaskan pula, pendidikan politik yang baik didasari oleh keterbukaan, transparansi dan aksesibilitas yang baik pula.

Pelopor pendidikan politik menjelang pilpres mesti didukung dengan mengetahui hak dan kewajiban warga negara yang dasar-dasar seperti mengetahui hak untuk memilih dengan menggunakan E-KTP, cerdas tidak terlalu cepat terhadap berita yang bersebar apalagi terkait menjatuhkan lawan politik (hoax), berhak mengetahui dan berpartisipasi dalam mengawal

pilpres dengan mendukung pihak KPU, BANWASLU, Dewan Kehormatan Pemilu untuk mengadukan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh capres maupun cawapres, masyarakat harus cerdas juga dalam melihat *trackrecord* prestasi dan perjalanan politik masing-masing pasangan untuk mendapatkan pemimpin yang benar sebagai keinginan rakyat untuk mendukung pembangunan, kemajuan infrastruktur, pendidikan dan cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia masa mendatang.

Peneliti ingin menyampaikan bahwa jelang pilpres tahun 2019, sangat rentan dengan adanya kerawanan pemilu. Kerawanan pemilu mesti di lihat juga dengan kaca mata pengetahuan politik yang mumpuni. Pendidikan politik berbeda dengan sekedar sosialisasi. Pendidikan politik dilakukan dengan keberlanjutan dan mengubah mindset para pemilih jelang pilpres 2019 bagi masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan pemilihan umum yang berasaskan kepada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (LUBERJURDIL).

Sementara pada sosialisasi pemilu hanya dilakukan secara periodik tidak secara berkelanjutan yang sifatnya hanya memberitahukan kepada masyarakat tanpa ingin mengetahui feedback yang dilakukan masyarakat untuk melakukan pencerdasan politik yang lebih mumpuni.

### **Dampak Media Massa, Media Sosial Dan Kontrol Masyarakat Jelang Pilpres 2019**

Media telah dikenal luas pada abad ke 21 dengan perkembangan yang pesat dan signifikan. Media telah masuk di seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dan sangat dekat dengan segala aktivitas-aktivitas sehari-hari terlebih di tahun politik. Media bisa di jadikan landasan untuk ajang penyampaian informasi, bisa merombak kebudayaan masyarakat yang terimbas pada globalisasi hingga ke sendi-sendi pilpres 2019.

Keterkaitan media dengan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia sangat erat bahkan tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lain media yang menjadi pilar demokrasi antara lain yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers. Kebebasan di era informasi membuat perjalanan demokrasi lebih baik dengan informasi yang tersedia di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu media sosial yang menjadi jembatan aktor-aktor politik terhubung kepada masyarakat secara personal. Hubungan yang terjalin melalui media sosial antara aktor politik bisa melalui facebook, instagram, twitter, dan lain sebagainya. Keberadaan media sosial membuat lebih dekat dengan masyarakat meskipun aktor politik berada pada waktu, ruang dan jarak yang berbeda bahkan jauh. Masyarakat dapat berkomunikasi langsung serta menjadi kontrol sosial di dalam kehidupan sosial politik yang ada. Media social juga sebagai pembangunan citra masing-masing aktor, agenda setting yang dimainkan aktor untuk memunculkan dirinya dihadapan para konstituen dan netizen. Dari hal-hal yang kecil hingga hal yang bersifat pribadi ditampilkan untuk menciptakan opini publik terhadap dirinya.

Menurut Kovack (Edward, 2018:37) keterkaitan media massa dan penyelenggaraan demokrasi tidak akan eksis tanpa jurnalisme, gosip rumor, jurnalisme yang bercampur dengan hiburan, atau jurnalisme yang menjadi propaganda politik yang meracuni demokrasi. Media massa dalam kehidupan sehari-hari juga sebagai lembaga kontrol yang terkadang dinilai tunggal sebagai penebar isu-isu terkini terkait pilpres dan kepentingan golongan tertentu. Terlebih jika para media massa ini dimiliki oleh seseorang, golongan yang juga menjadi golongan partai tertentu, tentunya akan digiring opini publik sesuai kepentingan pemilik media massa.

Untuk bisa membentuk dewan independensi pers tentu saja melalui lembaga independen melalui dewan pers Tujuan dari pers yaitu independen memenuhi

HAM dan penegakan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya dukungan *civil society* untuk mengontrol media tetap netral dan berimbang untuk menghadapi pilpres yang terjadi di 2019 dimasa mendatang.

## **PENUTUP**

Pemilihan umum sebuah mekanisme kompetitif dalam memilih pemimpin melalui kontestasi mendapatkan suara rakyat sehingga pemimpin yang terpilih tersebut bisa membuat keputusan-keputusan politik disebuah negara. Dengan terlaksananya pemilu dan pilpres di tahun 2019 mendatang memungkinkan terjadinya tantangan-tantangan yang terkait dengan isu saat kampanye maupun isu-isu tantangan yang terjadi saat pemilihan umum terlaksana.

Berbagai cara yang dilakukan dalam pemenangan kontestasi politik skema kesejahteraan seringkali dikembangkan terutama bertujuan untuk memperoleh dukungan electoral dan dikelola dengan memelihara ikatan klientisme. Patronase didefinisikan sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Barang-barang kelompok (*Club goods*) sebagai praktek patronase yang diberikan keuntungan kelompok sosial ketimbang keuntungan individual. Adanya *pork barrel* yaitu kegiatan yang ditujukan kepada public dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Pemilihan pemimpin yang baik harus dilaksanakan dengan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang cerdas dilahirkan melalui pendidikan politik yang mencerdaskan pula, pendidikan politik yang baik didasari oleh keterbukaan, transparansi dan aksesibilitas yang baik pula.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aspinall, E dan Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia patronase dan*



- klientisme pada pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta: polgov
- Bayo Longgina Dan Santoso Purwo.(2018). *Rezim local di Indonesia memaknai ulang demokrasi kita*. Yogyakarta: Obor
- Budiman arief. (1996). *Teori negara kekuasaan dan ideologi*. Jakarta : PT.gramedia
- Darmawan.(2015).*mengenal ilmu politik*. Jakarta: PT.Gramedia
- Edward dkk. (2018). *Milenial voters pemilu dalam kaca mata anak muda*. Yogyakarta: Rua aksara
- Lipset Seymour.(2007). *political man basis social tentang politik*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Mas'udi, W dan Lay, C. (2018). *Politik kesejahteraan kontestasi rezim kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia
- Schumpeter Joseph. (2013). *Capitalism, socialism, & democracy*. Yogyakarta : pustaka pelajar



